



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



BULETIN

KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

3

AGUSTUS 2025



UPACARA HARI
PENGAYOMAN KE-80



PENYERAHAN
PENGHARGAAN MENKUM



SYUKURAN HARI
PENGAYOMAN KE-80

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kanwil Kemenkum Kalsel Jalin Sinergi dengan OJK Kalsel Awasi Pendaftaran Fidusia



Banjarmasin, Info_Kemenkum – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNPB Fidusia melakukan kunjungan sekaligus koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (19/8/25).

Kunjungan ini dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, serta tim kerja terkait. Rombongan diterima oleh Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, bersama Deputi Direktur, Abidir Rahman, dan jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas upaya memperkuat sinergi dalam pengawasan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan di Kalimantan Selatan. Data monitoring AHU mencatat tren penurunan signifikan PNPB Fidusia dari tahun 2022 hingga 2024, yang salah satunya dipengaruhi oleh masih adanya perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan fidusia sesuai ketentuan maksimal 30 hari sejak akad kredit.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa koordinasi dengan OJK menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

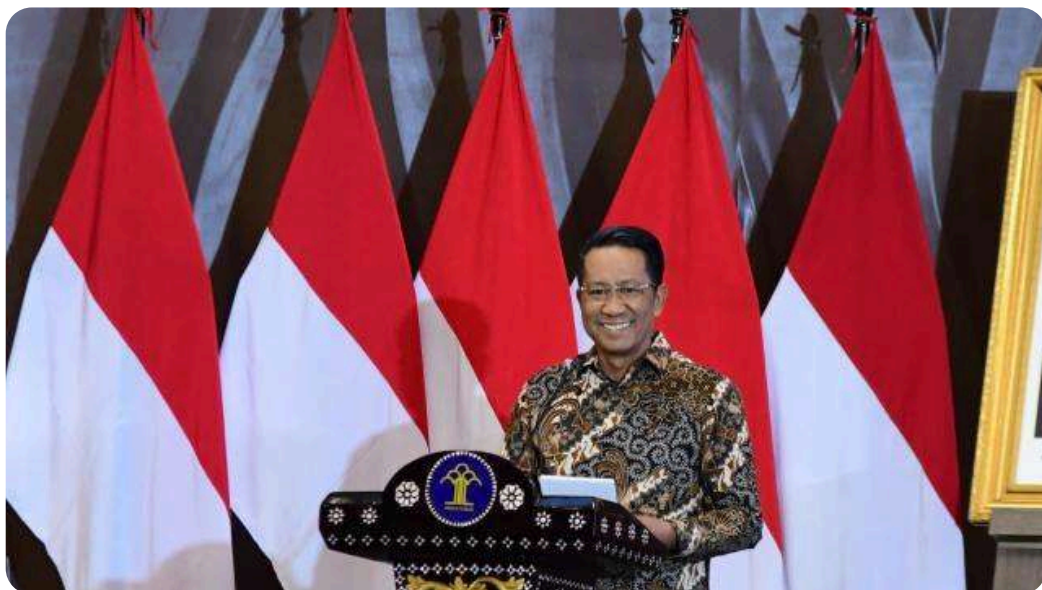
“Kami berharap dukungan OJK dalam mengawasi perusahaan pembiayaan agar wajib mendaftarkan fidusia. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan PNPB negara melalui layanan fidusia,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, menyambut baik langkah sinergi tersebut.

“OJK berkomitmen mengawal kepatuhan perusahaan pembiayaan, termasuk kewajiban pendaftaran fidusia. Kolaborasi bersama Kanwil Kemenkum Kalsel ini akan semakin memperkuat pengawasan, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dan penerimaan negara bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel dan OJK Kalsel menegaskan komitmen dalam mengoptimalkan tata kelola fidusia, menutup celah kebocoran PNPB, serta menghadirkan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Menkum Apresiasi Sikap Heroik Paskibraka Papua Barat Daya, Akan Beri Beasiswa Sekolah Kedinasan



Jakarta - Aksi heroik Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Papua Barat Daya yang terekam saat upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menarik simpati masyarakat, termasuk Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas. Atas kejadian tersebut, Menkum mengapresiasi ke tiga anggota Paskibraka melalui video call aplikasi WhatsApp.

"Saya sudah berkomunikasi melalui video call dengan ketiga siswa didampingi ibu Kesbangpol di Sorong, setelah menyaksikan video (Paskibra) itu saya tersentuh melihat jiwa nasionalis adik-adik tersebut," ujar Menkum, Senin (18/08/2025).

Video yang viral tersebut memperlihatkan barisan paskibraka yang bertugas dalam upacara. Di barisan terdepan, seorang anak laki-laki yang diketahui bernama Kristo Dimara tampak hampir pingsan. Dengan sigap, kedua rekannya yaitu Afgan Sapulete dan Frans Beto Kolowa menggandeng rekannya agar mampu berdiri menyelesaikan rangkaian upacara.

Dari hasil komunikasi Menkum bersama mereka, Menkum mengatakan akan memberikan bantuan sepeda motor kepada Kristo dan kedua temannya. Selain itu, Menkum juga menawarkan beasiswa bagi Kristo di sekolah kedinasan milik Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Dari hasil video call saya dan ketiga siswa tadi, sesuai dengan keinginan mereka, saya akan berikan bantuan kendaraan berupa sepeda motor," ujar Menkum.

"Saya juga akan memberikan akses untuk bergabung ke Kementerian Hukum melalui sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman milik Kemenkum, jika mereka berkenan," tambah Menkum.

Pasca viralnya video kejadian anggota Paskibraka yang hampir pingsan dimuat di salah satu akun media sosial Instagram, Menkum melalui media sosial pribadinya mencoba mencari tahu keberadaan tiga anggota Paskibra tersebut. Melalui perantara kantor wilayah Kemenkum Papua Barat, Menkum berhasil menghubungi ketiga siswa yang berada di Sorong. Menkum berharap mereka tetap menjunjung jiwa nasionalismenya.

"Mereka anak-anak luar biasa, rasa nasionalismenya sungguh menyentuh hati. Teruslah berbangga menjadi Warga Negara Indonesia," harap Menkum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menyampaikan apresiasi atas sikap heroik tiga anggota Paskibraka Papua Barat Daya.

"Kisah yang ditunjukkan oleh adik-adik Paskibraka ini sungguh menginspirasi kita semua. Nilai kebersamaan, saling mendukung, dan semangat nasionalisme yang mereka perlihatkan adalah teladan bagi generasi muda di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Kami di jajaran Kementerian Hukum akan terus mendorong agar semangat seperti ini tumbuh di hati setiap anak bangsa," ujar Alex.



Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Pembukaan Webinar Nasional Integritas & Anti Korupsi Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti pembukaan Webinar Nasional Anti Korupsi dengan tema “Integritas & Anti Korupsi: Dari Kesadaran menjadi Kebiasaan”, Selasa (19/8) secara virtual dari ruang kerja masing-masing ini bertujuan untuk memperkuat wawasan, komitmen, serta membangun budaya integritas dalam upaya pemberantasan korupsi dari akar.

Dalam laporannya, Kepala BPSDM Kementerian Hukum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Menteri Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025. Tujuan utama webinar adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, memperkuat nilai-nilai integritas, serta mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi berkelanjutan.

Webinar menghadirkan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pembicara kunci, serta narasumber Deputy Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Albertina Ho. Dalam keynote speechnya, Ibnu Basuki menegaskan pentingnya peran strategis Kementerian Hukum dalam penyusunan dan pengelolaan hukum, regulasi, serta perlindungan kekayaan intelektual yang dihadapkan pada berbagai tantangan. Ia menyampaikan tiga pesan kunci dalam pencegahan korupsi, yaitu membangun kesadaran risiko, disiplin pada mekanisme pengendalian, dan mengubah perilaku menjadi budaya integritas.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, yang menekankan tiga kunci utama pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas. Ia juga menyoroti empat langkah strategis pencegahan korupsi, yakni reformasi birokrasi berkelanjutan, pelatihan dan pendidikan integritas, transformasi digital, serta peningkatan pembangunan Zona Integritas.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar integritas bukan hanya slogan, tetapi menjadi karakter.

“Integritas dan antikorupsi harus kita mulai dari diri sendiri, lalu dibiasakan dalam keseharian, hingga akhirnya menjadi budaya kerja. Dengan semangat Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman, kita perkuat komitmen bebas dari korupsi untuk pelayanan publik yang semakin berintegritas,” tegasnya.

Melalui webinar ini, diharapkan jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel, semakin konsisten dalam menjadikan integritas sebagai budaya kerja, memperkuat transparansi, serta mendorong pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi.



Dari Kesadaran Jadi Kebiasaan, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar Nasional Integritas & Anti Korupsi



Banjarmasin, Humas_Info – Seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Webinar Nasional Integritas & Anti Korupsi dengan tema “Integritas & Anti Korupsi: Dari Kesadaran menjadi Kebiasaan”, Selasa (19/8). Kegiatan ini diikuti secara virtual dari ruang kerja masing-masing sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pemahaman dan budaya integritas di lingkungan kerja.

Webinar menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Deputy Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Albertina Ho.

Dalam paparannya, Wawan Wardiana menjelaskan pentingnya pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun instansi pemerintah. Menurutnya, budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini agar menjadi karakter bangsa. Sementara itu Albertina Ho menambahkan perspektif dari dunia peradilan, bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi keadilan. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum adalah kunci menjaga marwah peradilan sekaligus menekan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menanggapi materi yang disampaikan, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, mengapresiasi partisipasi aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan ini.

“Materi yang disampaikan para narasumber sangat relevan dengan tugas kita di Kementerian Hukum. Saya berharap seluruh pegawai tidak hanya memahami, tetapi juga mempraktikkan integritas dalam keseharian. Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Dengan mengikuti webinar ini, diharapkan jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel semakin memperkuat komitmen membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan BTN, Bahas Kerja Sama Strategis



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), Alex Cosmas Pinem menerima kunjungan jajaran Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Banjarmasin, Selasa (19/08/2025) bertempat di Ruang Kerja Kakanwil. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BTN Banjarmasin, Jastrawan Pesulima bersama jajaran.

Dalam kesempatan itu, Alex Cosmas Pinem didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka. Pertemuan ini berlangsung sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang kerja sama strategis antara Kemenkum Kalsel dan BTN, khususnya dalam mendukung operasional serta pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenkum Kalsel.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan BTN.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Sinergi antara Kemenkum Kalsel dengan perbankan, khususnya BTN, sangat penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di Kalimantan Selatan,” ungkap Alex.

Sementara itu, Kepala Cabang BTN Banjarmasin, Jastrawan Pesulima, menegaskan komitmen BTN untuk mendukung Kemenkum Kalsel melalui layanan dan fasilitas perbankan yang terpercaya.

“BTN siap mendukung kebutuhan pengelolaan anggaran dan layanan keuangan bagi Kemenkum Kalsel. Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kedua belah pihak,” ujar Jastrawan.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, sebagai langkah awal memperkuat hubungan kelembagaan antara Kemenkum Kalsel dan BTN dalam rangka mendukung pembangunan layanan publik yang lebih baik.

Tiga Kunci Berantas Korupsi



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Jakarta – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy Hiariej menyampaikan tiga kata kunci yang harus dilakukan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu integritas, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan oleh Wamenkum pada Webinar Nasional Integritas dan Anti Korupsi ‘Dari Kesadaran Menjadi Kebiasaan’.

“Di dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi itu ada 3 kata kunci dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kata kunci yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah transparansi dan yang ketiga adalah akuntabilitas,” ujar Wamenkum di Graha Pengayoman, pada Selasa (19/08/2025).

Menurut Wamenkum, keberhasilan sistem peradilan pidana modern diseluruh dunia tidak terletak pada berapa banyak kasus yang diungkap, tapi bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

“Keberhasilan sistem peradilan pidana modern diseluruh dunia itu tidak terletak pada berapa banyak kasus yang dia ungkap, tapi bagaimana dia mencegah terjadinya tindak pidana atau mencegah terjadinya kejahatan tersebut,” kata Wamenkum.

Untuk itu, lanjut Wamenkum, ada empat faktor yang menjadi sasaran dalam penegakan hukum yaitu substansi hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum.

“Di dalam budaya hukum yang paling utama adalah kesadaran hukum setiap warga negara, dan harus kita akui kita kesadaran hukumnya itu adalah kesadaran hukum yang bersifat heteronom, artinya kesadaran hukum kita itu datang dari luar bukan bersifat dari dalam diri kita sendiri karena ada yang mengawasi, karena ada undang-undang yang memuat sanksi pidana dengan tegas,” tutur Wamenkum.

Selain itu, Wamenkum juga menyampaikan bahwa ada empat langkah strategis dalam rangka pencegahan korupsi, yaitu reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputy Bidang Pendidikan.

“Langkah ketiga yaitu bagaimana kita melakukan transformasi digital, karena semakin sedikit, semakin kecil, semakin kurang kita bertemu dengan orang lain maka disitu ada langkah-langkah pencegahan dari anti korupsi termasuk didalamnya adalah sistem reward dan punishment,” kata Wamenkum.

“Langkah strategis yang keempat yang selalu kita hadapi bersama dan setiap tahun itu menjadi evaluasi kita bagaimana peningkatan zona integritas baik WBK maupun WBBM,” tutupnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan KPK dan mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan integritas sebagai identitas kerja.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi juga perlu didorong oleh budaya integritas dan antikorupsi. Budaya ini bisa dimulai dari diri sendiri, menerapkan perilaku jujur dan berintegritas berulang-ulang,” tekan Gusti Ayu.

Kegiatan webinar ini diinisiasi oleh BPSDM Hukum dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80 dan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025 dan dilaksanakan secara hybrid.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik arahan pemberantasan korupsi yang disampaikan Wamenkum, yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Nilai ini harus menjadi budaya kerja aparatur Kemenkum, bukan sekadar slogan. Pencegahan korupsi berawal dari kesadaran setiap individu untuk bekerja jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Alex juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.





Dua Ranperbup HSU Dibahas, Kanwil Kemenkum Kalsel Pastikan Selaras dengan Regulasi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Hulu Sungai Utara, yakni Ranperbup tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem. Dalam arahannya, Eryck menegaskan bahwa harmonisasi menjadi tahapan penting untuk menjamin keselarasan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam setiap rancangan produk hukum daerah.

“Dengan adanya harmonisasi, diharapkan rancangan peraturan bupati yang diajukan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas, termasuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan,” ujarnya.

Kegiatan yang digelar di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (20/8) ini dihadiri oleh Rusdiya Risna selaku Kepala Bidang Penetapan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Kehadiran perwakilan daerah ini mencerminkan komitmen Pemkab HSU untuk memastikan rancangan peraturan yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap Raperbup yang diusulkan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Kanwil Kemenkum Kalsel Matangkan Kolaborasi Bakul Fest 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menggelar rapat internal persiapan Bakul Fest 2025, Rabu (20/8) di Balai Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama Tim Pelayanan KI ini membahas berbagai aspek penting untuk memastikan kesuksesan acara yang dijadwalkan berlangsung pada 1–30 September 2025 mendatang.

Sejumlah pihak terkait turut hadir, antara lain Kodim 1007/Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, Kanwil Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pertanahan Nasional, Imigrasi, serta instansi dan lembaga pendukung lainnya.

Dalam rapat, dibahas beberapa poin strategis, mulai dari koordinasi partisipasi lembaga terkait dalam membuka stan layanan publik, penentuan lokasi dan desain tata letak stan yang ramah pengunjung, penyusunan rundown acara hingga teknis pelaksanaan yang mencakup logistik, keamanan, dan fasilitas pendukung.

“Bakul Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi momentum kolaborasi antar instansi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen menghadirkan pelayanan kekayaan intelektual yang mudah dijangkau sekaligus mempromosikan pentingnya perlindungan KI,” ujar Riswandi.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap Bakul Fest dapat berjalan lancar, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif untuk memperluas pemahaman publik tentang kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.



Cegah Regulasi “Sim Salabim”, DPRD dan Kemenkum Kalsel Perkuat Sinergi



Banjarmasin, P3H_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Analisa dan Evaluasi (ANEV) Produk Hukum Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (20/8/2025).

Koordinasi ini membahas pemanfaatan layanan Harmonisasi dan ANEV produk hukum daerah. Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Rakhmat Riyadi Akbar, menegaskan bahwa DPRD sangat memerlukan dukungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, khususnya dalam proses harmonisasi dan evaluasi peraturan daerah.

“Harmonisasi sudah berjalan baik karena berbasis aplikasi E-Harmon. Ke depan, DPRD Kota akan mengajukan permohonan ANEV untuk produk hukum yang sudah berusia lebih dari dua tahun,” ungkap Rakhmat.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin. Ia berharap agar DPRD dapat konsisten dalam memanfaatkan layanan harmonisasi dan evaluasi demi mendukung transformasi hukum di Kalimantan Selatan.

Ketua Tim Kerja ANEV Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yunita, S.H., M.H., menutup kegiatan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. “Kolaborasi diperlukan agar produk hukum daerah yang lahir tidak bersifat sim salabim, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kakanwil Kemenkum Kalsel Ajak Bupati Tanah Laut Optimalkan Potensi Daerah Lewat Perlindungan Hukum



Tanah Laut, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana serta Tim Penyuluh Hukum, melaksanakan audiensi dengan Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, pada Rabu (20/08/2025) di Kantor Bupati Tanah Laut.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta peningkatan layanan hukum dan perundang-undangan di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil memperkenalkan sejumlah program prioritas Kementerian Hukum, salah satunya mendorong pembentukan Posbankum di seluruh 135 desa dan kelurahan di Tanah Laut. Kehadiran Posbankum ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat memiliki sarana penyelesaian masalah hukum secara lebih dekat dan terjangkau. Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya harmonisasi terhadap seluruh peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah agar produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih jauh, Kakanwil menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai upaya mendukung perekonomian daerah. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menginventarisasi produk unggulan lokal yang dapat diajukan sebagai Indikasi Geografis (IG), sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing hasil produksi masyarakat.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kakanwil beserta jajaran. Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembentukan Posbankum, meskipun menekankan perlunya petunjuk teknis yang dapat dijadikan dasar oleh para kepala desa dan lurah dalam pendiriannya. Bupati juga menyampaikan bahwa selama ini kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kalsel sudah berjalan dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah, dan ke depan akan diperluas hingga ke harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah. Terkait Indikasi Geografis, ia memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi produk unggulan lokal sesuai arahan dari Kakanwil.

Pertemuan ini berlangsung dengan baik dan lancar, serta menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan layanan hukum, penyempurnaan regulasi, dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah.



Posbankum Jadi Solusi, Kemenkum Kalsel Edukasi Warga Ambawang Tanah Laut Soal Bantuan Hukum



Tanah Laut, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pada Rabu (20/8/2025), Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling terkait layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Balai Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan yang diikuti oleh 30 orang warga Desa Ambawang ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Ambawang, Hayatul Mursida, serta para Penyuluh Hukum yakni Dianor selaku Koordinator Penyuluh Hukum serta Tulus Achir Cahyadi dan Tutus Bahtiar selaku Penyuluh Hukum Ahli Pertama.

Dalam penyuluhan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai layanan yang tersedia di Posbankum, antara lain Layanan Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum dan Advokasi, Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi, hingga Layanan Rujukan Hukum. Disebutkan pula bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini terdapat 98 Posbankum yang terdaftar, sementara jumlah desa dan kelurahan mencapai 2008. Hal ini menunjukkan perlunya langkah strategis serta kolaborasi lintas sektor untuk memperluas pembentukan Posbankum.

Desa Ambawang sendiri telah menjadi contoh dengan membentuk Posbankum dan menunjuk dua orang paralegal yang aktif menyelesaikan persoalan hukum masyarakat, seperti sengketa lahan hingga konflik antar warga. Keberadaan Posbankum di tingkat desa dinilai strategis dalam memperkuat akses terhadap keadilan, sekaligus menjadi wadah peningkatan kesadaran hukum, penyelesaian sengketa, hingga pendampingan hukum bagi masyarakat pedesaan.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana warga Desa Ambawang menyampaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi sehari-hari.



Dari Karya Jadi Nilai Ekonomi, Sosialisasi Perda KI Dorong Inovasi Lokal di Hulu Sungai Selatan



Kandangan, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dan Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Aji Rifani menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Rabu (20/8) di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diikuti oleh Kepala Dinas dan instansi terkait, perwakilan DPRD HSS, perwakilan OPD lainnya, serta masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) dalam mendorong inovasi, ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing daerah. Materi yang dipaparkan meliputi penjelasan mengenai Perda Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum untuk mempermudah pengurusan KI di Kabupaten HSS, serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap KI agar karya dan inovasi masyarakat mendapat pengakuan dan jaminan hukum.

Selain itu, juga dijelaskan mengenai fasilitasi pendaftaran KI yang kini semakin disederhanakan sehingga pelaku usaha dan masyarakat lokal lebih mudah mendaftarkan produk maupun karya mereka untuk memperoleh perlindungan.

Dalam kesempatan ini, Meidy Firmansyah menekankan bahwa perlindungan KI bukan hanya tentang administrasi hukum, melainkan juga tentang memberikan nilai tambah dan kepastian bagi para pelaku usaha.

“Perlindungan kekayaan intelektual adalah investasi jangka panjang. Dengan KI yang terlindungi, produk dan karya masyarakat Hulu Sungai Selatan bisa bersaing lebih luas, bahkan sampai ke pasar global,” ungkapnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin memahami pentingnya perlindungan KI dalam meningkatkan nilai tambah produk, membuka peluang usaha, serta memperkuat ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Bimtek Coretax System, Dorong Kompetensi Bendahara Hadapi Sistem Perpajakan Modern



Banjarmasin, Info_Humas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) pada Kamis (21/8/2025) di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini mengusung tema “Menuju Sistem Perpajakan Modern dan Terintegrasi” dan diikuti oleh para peserta yang membidangi perpajakan dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Kanwil Ditjenpas Kalsel, Kanwil Ditjenim Kalsel, serta Kanwil HAM Kalsel.

Hadir membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka. Dalam sambutannya, Alex menekankan pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang menopang pembangunan bangsa.

“Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang nantinya menjadi anggaran pembangunan. Coretax adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Sistem ini menjadi pilar utama dalam perpajakan, sehingga bimtek ini penting bagi kita semua dalam meningkatkan kompetensi terkait sistem baru ini,” tegas Alex.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan Coretax System tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Lukman Nul Hakim dan M. Alpiannor F. Mastho, Penyuluh Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, yang memberikan materi teknis mengenai penggunaan Aplikasi Coretax.

Melalui bimtek ini, para bendahara satuan kerja diharapkan dapat lebih siap memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi terbaru, sehingga tertib administrasi perpajakan dapat terwujud di lingkungan Kemenkum Kalimantan Selatan.

Kegiatan berjalan lancar dengan harapan agar Coretax System dipadukan dengan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung mampu menjadi tonggak penting dalam membangun tata kelola perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Harmonisasi Ranperda Tabalong: Perlindungan Masyarakat Hukum Adat hingga Penataan Perangkat Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Kamis (21/08/2025) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana beserta tim perancang peraturan perundang-undangan.

Dua Ranperda yang dibahas yaitu Ranperda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (PPP MHA) serta Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menekankan bahwa harmonisasi Ranperda tidak sekadar menyelaraskan aturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga memastikan produk hukum yang lahir mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harmonisasi Ranperda harus menghasilkan regulasi yang berkualitas, sistematis, dan aplikatif. Selain kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, kami juga menelaah sistematika penulisan serta substansi materi agar benar-benar berdampak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Rapat harmonisasi ini menjadi tahapan penting sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Tabalong. Dengan adanya pendampingan dan analisis dari Kanwil Kemenkum Kalsel, diharapkan kedua Ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat di Tabalong.



Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Dua Ranperda Kabupaten Tabalong



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Penyerahan dilakukan saat pelaksanaan rapat harmonisasi pada Kamis (21/08/2025) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Dua Ranperda yang telah melalui proses harmonisasi yaitu Ranperda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hasil harmonisasi tersebut diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan pembahasan bersama DPRD.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa hasil harmonisasi ini tidak hanya berupa penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memuat masukan perbaikan dari aspek sistematika penulisan hingga substansi materi.

“Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat memperkuat kualitas Ranperda sehingga saat ditetapkan, regulasi ini benar-benar implementatif, memberikan kepastian hukum, dan berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan penyerahan hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong diharapkan dapat segera membawa Ranperda ke tahap pembahasan selanjutnya bersama DPRD. Kehadiran dua regulasi ini nantinya akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Pembukaan Pamor Borneo 2025: Perkuat Sinergi Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut menghadiri kegiatan pembukaan Pamor Borneo 2025, Kamis (21/8), di Grand Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin. Event bergengsi ini diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan.

Pamor Borneo 2025 merupakan wujud kolaborasi strategis yang menegaskan komitmen bersama dalam memajukan potensi ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, investasi, perdagangan, dan pariwisata. Acara ini mengusung tema “The New Kalimantan: Accelerating Growth through Investment, Trade, and Tourism” yang bertujuan mempromosikan Kalimantan sebagai destinasi investasi dan pariwisata baru di Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Marjadi, menyampaikan bahwa Pamor Borneo menjadi ajang yang mempertegas kontribusi pada tiga pilar penting, yakni mempercepat investasi, meningkatkan perdagangan, dan memperkuat sektor pariwisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memperkenalkan Geopark Meratus dan berbagai potensi wisata lain ke kancan internasional, Pamor Borneo 2025 juga diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM serta memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dalam acara ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap langkah kolaboratif lintas sektor yang digagas oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Partisipasi Kemenkum Kalsel diharapkan mampu memberi kontribusi dalam memberikan perspektif hukum dan regulasi, memastikan sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan koridor hukum, serta memperkuat jejaring dan kolaborasi antarinstansi. Kehadiran Kemenkum juga semakin menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem hukum dan bisnis yang sehat di Kalimantan Selatan, sejalan dengan upaya bersama untuk memperkuat daya saing daerah.

Melalui Pamor Borneo 2025, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun dunia usaha, demi terwujudnya pembangunan Kalimantan Selatan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Monev RKT-RB dan Pembangunan ZI B09 Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) serta Pembangunan Zona Integritas (ZI) B09 Tahun 2025 pada Kamis (21/8/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta ketua dan tim Pokja Pembangunan ZI.

Dalam pembukaannya, Kadiv P3H menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai tindak lanjut evaluasi data dukung (daduk) B03 dan B06, sekaligus persiapan pemenuhan daduk B09. Ia mengingatkan seluruh ketua kelompok kerja untuk segera memenuhi kewajiban penyusunan daduk RKT-RB B09 sebelum 12 September 2025 dan daduk ZI B09 sebelum 25 September 2025. Selain itu, ia juga menegaskan agar memastikan pemenuhan responden survei mandiri pada aplikasi 3AS terus dilaksanakan dengan target minimal yang ditetapkan.

Sementara itu, dalam arahannya Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, meminta seluruh tim agar segera memenuhi data dukung sesuai dengan linimasa yang telah ditetapkan.

“Kita harus memiliki komitmen yang sama dalam pembangunan Zona Integritas. Hal ini bukan hanya tanggung jawab tim Pokja, tetapi menjadi bagian dari semangat bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” tegas Alex. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai capaian, progres, dan kendala dari masing-masing Pokja. Secara keseluruhan, pelaksanaan Monev berjalan lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat langkah Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan pembangunan ZI yang berkualitas.





Upacara Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel, Momentum Refleksi dan Reformasi Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-80 Tahun 2025 pada Jumat (22/8) di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur pimpinan daerah, akademisi, serta perwakilan mitra kerja strategis.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem. Jalannya upacara dipimpin Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) sebagai Perwira Upacara, serta Kadiv Pelayanan Hukum yang membacakan sejarah singkat Kementerian Hukum.

Upacara turut dihadiri antara lain perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Walikota Banjarmasin, Rektor UIN Antasari, perwakilan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Kotabaru, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel, Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalsel, perwakilan Kanwil Ditjenpas Kalsel, Ketua Pengwil INI Kalsel, Kepala Jasmani Militer Korem 101/Antasari, perwakilan RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, serta pimpinan Cabang BRI Banjarmasin Samudra.

Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan Panji-Panji Kementerian Hukum, pembacaan sejarah singkat, pembacaan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, hingga Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mitra kerja yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan layanan Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan.

Adapun penerima penghargaan meliputi: Pemerintah Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel, UIN Antasari Banjarmasin, Jasmani Militer Korem 101/Antasari, RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalsel, serta Kantor Cabang BRI Banjarmasin Samudra.

Dalam amanatnya, Alex Cosmas Pinem membacakan sambutan Menteri Hukum RI yang menegaskan bahwa 80 tahun Pengayoman menjadi momen refleksi untuk menghadirkan hukum yang berpihak pada rakyat. Dengan tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”, Menteri Hukum menekankan bahwa pembangunan hukum merupakan syarat utama pembangunan nasional, sejalan dengan arahan Presiden.

Disampaikan pula capaian Kementerian Hukum, antara lain Indeks Reformasi Hukum 100, penguatan harmonisasi regulasi melalui JDIHN dan e-Harmonisasi, ribuan bantuan hukum dan Posbakum Desa, lonjakan pendaftaran Kekayaan Intelektual, hingga peresmian Kampus Pengayoman Pancasila. Namun demikian, tantangan masih ada, seperti regulasi yang tumpang tindih, rendahnya literasi hukum, penegakan Kekayaan Intelektual yang belum maksimal, serta perlunya peningkatan kepercayaan publik.

“Hari Pengayoman ke-80 tahun ini harus menjadi momentum untuk melanjutkan reformasi hukum. Kita tegakkan hukum berlandaskan Pancasila, menghadirkan hukum yang humanis, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Menteri Hukum RI dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Upacara.

Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas perjalanan panjang 80 tahun Kementerian Hukum RI. Upacara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat.



Final Funminton Meriahkan Penutupan Semarak Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Suasana penuh semangat dan antusiasme menyelimuti pertandingan final Funminton dalam rangka memperingati Hari Pengayoman dan HUT RI ke-80 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Jumat (22/8).

Pertandingan final yang digelar di Gedung Bulu Tangkis Kanwil Kemenkum Kalsel ini menjadi puncak rangkaian kompetisi yang sebelumnya diikuti 32 pasangan ganda campuran dari Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, dan Kanwil Hak Asasi Manusia Kalsel.

Dalam partai puncak, pasangan Ajie Prasetyo/Rizqi Fitriana tampil tangguh dan berhasil merebut gelar Juara 1 setelah mengalahkan pasangan Fahmi/Mutia yang harus puas sebagai Juara 2. Sementara itu, pasangan Ahmad Zubaidi/Eka Shanty menempati posisi Juara 3.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama turut hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Kehadiran pimpinan ini menambah semarak sekaligus memberikan motivasi lebih bagi peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan hingga partai final.



“Final Funminton ini bukan hanya sekadar pertandingan olahraga, tetapi juga simbol kekompakan dan kebersamaan di lingkungan kerja kita. Semangat sportivitas yang ditunjukkan peserta menjadi cerminan nilai-nilai Hari Pengayoman yang terus hidup di tengah kita,” ujarnya.

Final Funminton ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan olahraga dalam memperingati Hari Pengayoman ke-80. Lebih dari sekadar adu keterampilan, kegiatan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi antar pegawai lintas unit kerja, menghadirkan suasana kebersamaan, dan menumbuhkan energi positif di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Mahdian | ed: Eko)



Peringatan 80 Tahun Hari Pengayoman: Kakanwil Kalsel Alex Cosmas Pinem Serahkan Penghargaan Menteri Hukum Kepada Mitra Strategis



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja strategis yang dinilai berkontribusi nyata dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenkum di daerah. Penyerahan penghargaan ini berlangsung pada Jumat (22/8) di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, selaku Inspektur Upacara, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan sinergi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia perbankan, serta mitra lainnya.

“Sinergi ini menjadi kunci dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih baik, adaptif, dan berpihak pada masyarakat. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak yang telah bersama-sama membangun ekosistem hukum dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” ujar Alex.

Adapun mitra kerja yang menerima penghargaan meliputi:

- (1) Pemerintah Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, atas kontribusi dalam pemajuan serta perlindungan ekosistem Kekayaan Intelektual;
- (2) Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan kontribusi serupa di wilayah perkotaan;
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalsel, atas percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di 2.013 desa/kelurahan;
- (4) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang berperan dalam fasilitasi pelaksanaan Seleksi CAT CPNS Tahun Anggaran 2024;
- (5) Jasmani Militer Korem 101/Antasari dan RS Bhayangkara Tk.III Banjarmasin, yang mendukung seleksi tes kesamaptan dan kesehatan CPNS Tahun Anggaran 2024;
- (6) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, atas kerja sama dalam pelayanan produk kepegawaian dan seleksi PPPK;
- (7) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalsel, yang mendukung pendirian dan pendaftaran Koperasi Merah Putih;
- (8) Kantor Cabang BRI Banjarmasin Samudera, yang berkontribusi dalam pelayanan produk keuangan, tukin, dan payroll.

Pemberian penghargaan ini menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80 yang mengusung tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”. Melalui penghargaan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata hukum yang humanis, adaptif, dan berkeadilan bagi masyarakat.



Pemotongan Tumpeng Meriahkan Peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi pemotongan tumpeng, Jumat (22/8) di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 80 tahun Kementerian Hukum dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. Potongan tumpeng pertama kemudian diserahkan kepada perwakilan mitra kerja sebagai wujud apresiasi atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin.

Suasana penuh kebersamaan tampak dalam momen tersebut, di mana para tamu undangan, jajaran pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan pemerintah daerah dan mitra kerja turut hadir menyaksikan. Prosesi ini sekaligus menjadi penutup rangkaian upacara yang sebelumnya diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada stakeholder yang dinilai berkontribusi dalam pemajuan hukum, pelayanan publik, serta perlindungan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan bahwa pemotongan tumpeng ini bukan hanya bentuk tradisi seremonial, melainkan juga sebagai pengingat akan pentingnya kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa syukur dalam perjalanan panjang Kementerian Hukum yang kini telah memasuki usia 80 tahun.





Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Semarak Perlombaan Tradisional Meriahkan Puncak Hari Pengayoman ke-80



Banjarmasin, Humas_Info – Suasana penuh keceriaan dan kebersamaan mewarnai puncak peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Usai melaksanakan upacara peringatan yang mengangkat tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan,” para pegawai terlibat antusias mengikuti berbagai perlombaan tradisional yang digelar pada Kamis (22/8).

Perlombaan yang diadakan mencerminkan nilai kebersamaan dan kekompakan, di antaranya balap bakiak, makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga balap karung. Riuh sorak sorai, canda tawa, serta semangat kebersamaan tampak mendominasi jalannya perlombaan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, secara terpisah menyampaikan bahwa semarak perlombaan ini menjadi wujud syukur sekaligus refleksi perjalanan panjang Kementerian Hukum yang telah hadir selama delapan dekade.

“Perlombaan tradisional ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar pegawai. Semoga semangat Hari Pengayoman ke-80 dapat terus menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjaga warisan bangsa dan mewujudkan reformasi hukum demi masa depan yang lebih baik,” ungkap Alex.

Peringatan ini pun meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel, dengan penuh canda tawa dan kebersamaan yang mempererat rasa kekeluargaan di lingkungan kerja.





Semarak Hari Pengayoman ke-80, Kemenkum Kalsel Ikuti Upacara dan Syukuran Tingkat Pusat



Banjarماسin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem mengikuti Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025 Tingkat Pusat secara daring pada Jumat (22/08/2025). Kegiatan yang terpusat di Lapangan Kementerian Hukum Jakarta ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Zoom. Jajaran Kantor Wilayah Kalsel turut mengikuti rangkaian upacara dari Balai Pertemuan Garuda.

Turut berhadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial beserta CPNS Kantor Wilayah. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dalam amanatnya, menegaskan bahwa peringatan 80 tahun Pengayoman bukan sekadar seremonial, melainkan momentum refleksi untuk memastikan hukum benar-benar hadir di tengah masyarakat.

“Keberhasilan yang kita capai adalah keberhasilan kita semua. Mari jadikan momen ini untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menyukseskan transformasi digital pelayanan hukum, dan menjaga integritas sebagai insan pengayoman,” ujarnya. Supratman juga memaparkan capaian Kementerian Hukum di antaranya nilai sempurna Indeks Reformasi Hukum 100, penguatan harmonisasi regulasi melalui JDIHN dan E-Harmonisasi, pemberian ribuan bantuan hukum, pembentukan ribuan Posbakum Desa, peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual, hingga peresmian Kampus Pengayoman Pancasila. Namun demikian, ia menekankan masih ada tantangan besar yakni bagaimana menjadikan hukum sebagai milik rakyat: sederhana, jelas, melindungi, dan tidak membebani.

“Di usia 80 tahun ini, mari kita lanjutkan reformasi hukum, tegakkan hukum berlandaskan Pancasila, hadirkan hukum yang humanis, adaptif, dan berpihak pada rakyat. Tugas kita adalah menghormati para pahlawan hukum dengan bekerja lebih keras, lebih jujur, lebih berani, dan lebih tulus demi rakyat,” pesan Supratman.

Pada kesempatan tersebut, turut diberikan penghargaan kepada pegawai teladan serta mitra kerja sama dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan Syukuran Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025 yang turut diikuti jajaran Kantor Wilayah. Momentum ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus tekad bersama untuk terus menjaga warisan pengayoman dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat.

Syukuran Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel, Berikan Apresiasi kepada Pemenang Lomba



Banjarmasin, Humas_Info – Suasana penuh kebersamaan mewarnai puncak peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Jum'at (22/8). Usai serangkaian perlombaan tradisional yang digelar untuk memeriahkan peringatan, acara ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba serta syukuran sederhana sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan delapan dekade Kementerian Hukum.

Perlombaan yang diikuti dengan antusias oleh para pegawai, badminton pemula, domino, serta lomba tradisional balap bakiak, makan kerupuk, balap karung, hingga memasukkan pensil ke dalam botol, menciptakan suasana penuh canda tawa dan kekompakan. Momen penyerahan hadiah oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama karena selain memberikan penghargaan, juga mempererat semangat persaudaraan antar pegawai.

Acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran Hari Pengayoman ke-80 yang ditandai dengan pemotongan Kue. “Momentum ini menjadi bentuk rasa syukur kita atas perjalanan Kementerian Hukum yang telah hadir selama 80 tahun. Semoga dengan kebersamaan ini kita semakin solid, semangat, dan berkomitmen menjaga warisan bangsa sekaligus mendukung terwujudnya reformasi hukum untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Alex.

Kegiatan penyerahan hadiah dan syukuran ini menjadi penutup yang manis dari seluruh rangkaian semarak Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel, meninggalkan kesan mendalam berupa kebahagiaan, kebersamaan, serta tekad untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.





Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan 24 Sertifikat Merek Terdaftar untuk UMKM Binaan DKUMPP Banjar



Banjarماسin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar menyerahkan 24 sertifikat merek terdaftar kepada pelaku UMKM binaan DKUMPP, Jumat (22/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel ini dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Tim Layanan KI, serta perwakilan DKUMPP Kabupaten Banjar.

Penyerahan sertifikat ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif kepada produk UMKM Banjar, sekaligus mencegah pemalsuan serta meningkatkan daya saing usaha lokal. Selain penyerahan sertifikat, kegiatan juga menjadi sarana edukasi bagi pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek dan kekayaan intelektual dalam pengembangan usaha.

Melalui kegiatan ini, DKUMPP Banjar turut menyampaikan manfaat regulasi daerah yang mendukung pendaftaran merek serta mendorong pelaku usaha untuk lebih aktif melindungi produknya.

Kanwil Kemenkum Kalsel berharap langkah ini menjadi awal meningkatnya kesadaran UMKM di Kabupaten Banjar terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.





Delapan Dekade Kemenkum Mengawal Reformasi Hukum Indonesia



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) baru saja memasuki usia ke-80 tahun pada 19 Agustus 2025 lalu. Puncak peringatan hari ulang tahun, yang disebut sebagai Hari Pengayoman, ditandai dengan upacara yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat (22/08/2025). Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Hari Pengayoman memiliki banyak makna, yaitu memastikan hukum tetap berlandaskan pada Pancasila, mewujudkan reformasi hukum, serta menyiapkan hukum yang siap mengantar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

"Tema yang kita usung tahun ini adalah 'Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan', saya maknai sebagai pesan berlapis. Pertama, menjaga warisan berarti memastikan hukum tetap berpijak pada Pancasila, adat, dan keadilan sosial," kata Menkum di lapangan upacara Kemenkum.

"Kedua, mewujudkan reformasi hukum berarti melakukan perubahan nyata agar hukum tidak ketinggalan zaman, adaptif terhadap tantangan digitalisasi, globalisasi, dan demokratisasi. Ketiga, menyongsong masa depan berarti menyiapkan hukum yang siap mengantar bangsa menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa masih banyak tantangan yang harus dijawab oleh Kemenkum demi tercapainya reformasi hukum sebagai pondasi Indonesia Emas. Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk berbenah diri. Menkum mengatakan hukum harus jelas dan bisa dipahami oleh siapapun. "Tugas kita adalah bagaimana menjadikan hukum bukan hanya instrumen negara, tetapi juga dimiliki rakyat. Hukum yang sederhana, jelas, dan bisa dipahami siapa pun. Hukum yang melindungi, bukan membebani," himbau Menkum.

Dalam pesannya sebagai inspektur upacara, Supratman mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa reformasi hukum adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Keberhasilan program-program unggulan pemerintah hanya bisa dicapai dengan dukungan regulasi yang dapat memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, reformasi hukum juga akan menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

"Tanpa hukum yang kuat, ekonomi akan rapuh, demokrasi akan goyah, dan persatuan bisa tercerai-berai. Pesan itu adalah peringatan sekaligus penegasan: bahwa reformasi hukum adalah pondasi bagi Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Di usia Kemenkum yang telah genap delapan dekade, Menkum mengajak seluruh insan Pengayoman, sebutan bagi pegawai Kemenkum, untuk bersama lanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, transparansi, dan keterbukaan.

"Bung Karno mengatakan 'bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya'. Maka tugas kita hari ini adalah menghormati para pahlawan hukum dengan cara bekerja lebih keras, lebih jujur, lebih berani, dan lebih tulus demi rakyat," tutupnya.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum pertama kali dibentuk pada tahun 1945. Sejak saat itu, Kementerian Hukum telah mengalami lima kali pergantian nomenklatur karena kebutuhan zaman dan dinamika pembangunan hukum di Indonesia, dimulai dari "Departemen Kehakiman" hingga kini menjadi "Kementerian Hukum".

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa peringatan 80 tahun Hari Pengayoman menjadi momentum untuk memperkuat komitmen reformasi hukum di daerah.

"Kami di Kalimantan Selatan siap menerjemahkan arahan Menteri Hukum dengan menghadirkan hukum yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami masyarakat, sehingga hukum benar-benar menjadi pelindung, bukan beban, serta menjadi pondasi bagi tercapainya Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Memastikan Tanggungjawab Platform Global Dalam Royalti, Menkum Kampanye Protokol Jakarta di Forum Asean

Kuala Lumpur, Malaysia - Selain menghadiri kegiatan Asean Law Summit di Kualalumpur Malaysia pada 19-22 Agustus, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memuluskan agenda protokol Jakarta yang akan diinisiasi Indonesia dalam agenda World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss pada akhir tahun 2025. Protokol Jakarta merupakan sebuah gagasan yang akan memastikan adanya benefit fairness dari Platform Global terkait intellectual property, kepada pencipta baik itu dalam karya musik maupun publisher (penerbit).

“WIPO merupakan organisasi yang mengurus intellectual property beranggotakan sekitar 194 negara, jika kompak dan sepakat maka akan mampu menekan platform global memberikan benefit fairness terhadap hak cipta, baik itu musik ataupun publisher,” ungkapnya.

Dalam pertemuan bersama Minister Trade and Cost Living Malaysia, Datok Armizan bin Mohd. Ali, Menteri Hukum Supratman memastikan bahwa gagasan ini bertujuan memastikan sistem pemungutan royalti yang berlaku secara internasional. “Saat ini platform global memberikan remunerasi berbeda di setiap negara dalam apresiasi royalti, kita butuh sistem pungutan yang berlaku secara internasional,” katanya.

Terkait gagasan tersebut, Datok Armizan memahami dan mendukung ide yang akan disampaikan di Forum WIPO di Jenewa, Swiss. “Malaysia memiliki kesamaan dalam memperjuangkan IP dan juga sistem collecting seperti yang dilakukan di Indonesia,” tegasnya.

Sebelum bertemu dengan Minister Trade and Cost of Living Malaysia, Menteri Hukum Supratman juga sempat berbincang dengan Jaksa Agung Brunei Darussalam, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohammed Taib. Di Brunei, Intellectual Property secara khusus berada dibawah Kejaksaan Agung.

Seperti halnya Malaysia, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nor Hashimah juga mendukung gagasan Indonesia di Forum WIPO. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut mendukung atas inisiatif Protokol Jakarta yang diusung Menteri Hukum di forum internasional.

“Gagasan ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para pencipta dan penerbit, karena sistem royalti yang berlaku secara internasional akan memberi perlindungan nyata sekaligus penghargaan yang layak atas karya intelektual,” ujarnya.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/@kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id